

EVALUASI KEBERHASILAN SISTEM TERINTEGRASI SIPD – SIMPAD DALAM PENGEMBALIAN BELANJA DAERAH

Oleh:

¹Febby Reysa Dian Pratiwi, ²Ahmad Zaini Miftah

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Departemen Ilmu Terapan, Sekolah Vokasi,
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

e-mail :febby22004@mail.unpad.ac.id¹ a.z.miftah@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This study was motivated by the fact that the expenditure reimbursement process is still carried out manually and through two separate systems, namely SIPD and SIMPAD, which require repeated data input and result in a slow validation process. This study aims to analyze the success of SIPD-SIMPAD integration based on user perceptions of efficiency and accountability using the DeLone & McLean Model. It uses a qualitative method with a case study approach through interviews and observations of system users in the DKI Jakarta Provincial Government environment. The results show that system integration has a positive impact on efficiency, data accuracy, transparency, and accountability. The system is considered easy to use, fast, and stable, with technical support that helps users adapt. The success of this integration reflects how technology, organizational support, and human resource readiness complement each other and form a new, more efficient and adaptive work pattern in the government environment.

Keywords: SIPD-SIMPAD, Regional Financial Information System, Efficiency, Accountability, DeLone & McLean Model.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya proses pengembalian belanja yang dilakukan manual dan melalui dua sistem terpisah, yaitu SIPD dan SIMPAD, yang harus melakukan input data berulang dan menyebabkan proses validasi yang lambat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberhasilan integrasi SIPD-SIMPAD berdasarkan persepsi pengguna terhadap efisiensi dan akuntabilitas dengan Model DeLone & McLean. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan observasi pada pengguna sistem di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem berdampak positif terhadap efisiensi, keakuratan data, serta transparansi dan akuntabilitas. Sistem dinilai mudah digunakan, cepat, dan stabil, dengan dukungan teknis yang membantu pengguna beradaptasi. Keberhasilan integrasi ini mencerminkan bagaimana teknologi, dukungan organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia saling melengkapi dan membentuk pola kerja baru yang lebih efisien dan adaptif di lingkungan pemerintahan.

Kata Kunci: SIPD-SIMPAD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Efisiensi, Akuntabilitas, Model DeLone & McLean.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 menuntut pemerintah untuk bertransformasi menuju tata kelola yang digital, efisien, dan transparan. Transformasi ini mencakup perubahan budaya kerja, sistem organisasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan publik (Manik & Juwono, 2024). Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital menjadi semakin penting seiring dengan penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

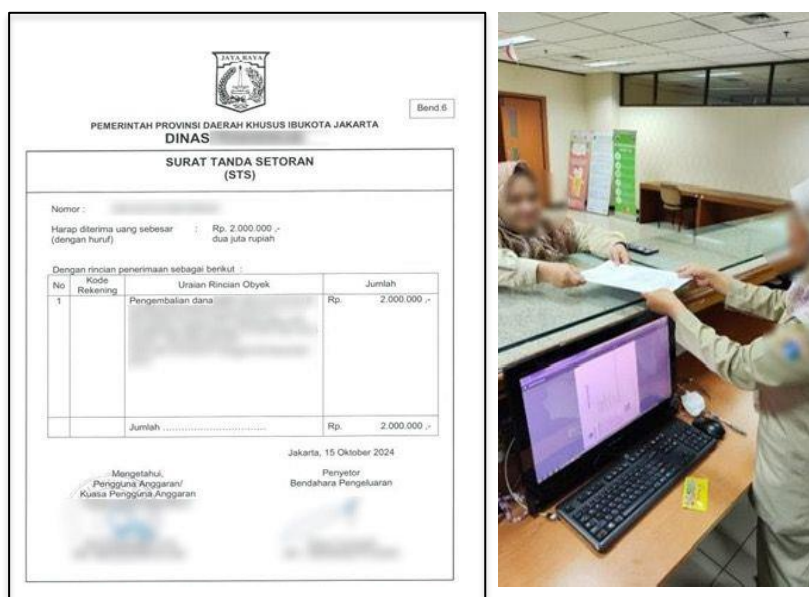
Bagi pemerintah, sangat penting untuk menerapkan perubahan digital karena teknologi berkembang dengan cepat, dan masyarakat semakin menginginkan layanan yang lebih baik (Fitri Rahmadany, 2024). Penggunaan sistem informasi merupakan langkah yang cerdas untuk menampilkan data yang terbuka dan dapat dilihat publik, sehingga pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih transparan, dapat diandalkan, dan dipercaya oleh masyarakat (Septiani & Isnawaty, 2024). Salah satu bentuk nyata transformasi digital tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penatausahaan keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD) untuk pengelolaan pendapatan asli daerah (Asih, 2024).

Namun, dalam praktiknya meskipun kedua sistem ini telah diterapkan untuk mengelola keuangan secara digital, tetapi keduanya belum sepenuhnya terintegrasi saat digunakan. Hal ini menyebabkan kendala teknis dan administratif dalam proses administrasi, terutama saat melakukan pengembalian belanja daerah.



Gambar 1 Proses Pengembalian Belanja Sebelum Kedua Sistem Terintegrasi

Berdasarkan alur pada gambar, pengembalian belanja daerah terbagi dua yaitu tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Untuk tahun berjalan, SKPD menginput STS (Surat Tanda Setoran) secara digital di SIPD, mencetaknya, lalu mentransfer dana ke rekening kuasa BUD. Setelah itu, STS (Surat Tanda Setoran) dan bukti transfer diunggah ke SIMPAD. SBPK kemudian memeriksa dokumen tersebut dengan mencocokkan data SIPD dan SIMPAD secara manual. Jika sesuai, SBPK menerbitkan Nota Penerimaan Daerah (NPD) melalui SIMPAD untuk diberikan kepada SKPD. Terakhir, BPKD menyusun laporan konsolidasi realisasi pengembalian. Kesimpulannya, meskipun sudah digital, tetapi SIPD dan SIMPAD belum terintegrasi, sehingga SKPD harus mencetak STS (Surat Tanda Setoran) dari SIPD dan mengunggahnya ulang ke SIMPAD agar bisa divalidasi.



Gambar 2 Surat Tanda Setoran Manual dan Proses pengantaran STS ke SBPK

Sedangkan, proses pengembalian belanja daerah dari tahun sebelumnya masih dilakukan secara manual dan cukup memakan waktu. Setiap SKPD harus membuat Surat Tanda Setoran (STS) secara mandiri menggunakan *Microsoft Word*, mencetaknya, lalu mentransfer dana ke rekening kuasa BUD. Setelah itu, dokumen STS beserta bukti transfer harus dikirim langsung ke Suku Badan Pengelola Keuangan (SBPK) sesuai wilayah kerja masing – masing. Sesampainya di SBPK, petugas kembali harus memasukkan data tersebut ke dalam sistem SIMPAD. Setelah itu, mereka mencetak Nota Penerimaan Daerah (NPD) dan mengembalikannya lagi ke SKPD dalam bentuk fisik. Prosedur yang panjang ini seringkali menyebabkan keterlambatan, terutama dalam penginputan STS dan proses validasi dana yang bisa memakan waktu hingga tiga hari kerja. Selain lambat, cara ini juga menimbulkan biaya mobilisasi tambahan, rawan kesalahan input, dan berisiko kehilangan atau kerusakan dokumen karena semuanya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan SIPD dan SIMPAD pada akhir tahun 2024 melalui Surat Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Efektivitas Konsolidasi Data Pengembalian Belanja Daerah elalui Integrasi SIPD dan SIMPAD. Integrasi ini dirancang agar proses pengembalian belanja daerah menjadi lebih cepat, sederhana, dan tercatat secara otomatis antar sistem. Langkah ini sejalan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif dan transparan.

Urgensi penelitian ini muncul karena masih terbatasnya kajian yang menggambarkan bagaimana integrasi dua sistem keuangan publik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. (Septiani & Isnawaty, 2024) menemukan bahwa SIPD mampu mempercepat pengelolaan data keuangan, tetapi masih menghadapi kendala integrasi dan keterbatasan fitur. (Syuhada et al., 2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor publik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. Sementara, (Rahmatullah et al., 2025) melalui pendekatan Model DeLone & McLean menemukan bahwa kualitas informasi dan layanan merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepuasan pengguna serta manfaat bersih sistem.

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian ini menekankan pentingnya memahami efektivitas integrasi sistem tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari persepsi pengguna mengenai kemudahan, kecepatan, dan manfaat sistem dalam mendukung kinerja organisasi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai integrasi dua sistem keuangan daerah yaitu SIPD dan SIMPAD dalam konteks pengembalian belanja daerah. Berbeda dari studi terdahulu yang membahas SIPD secara tunggal, penelitian ini menyoroti integrasi kedua sistem melalui pendekatan kualitatif berbasis pengalaman pengguna, untuk memahami bagaimana integrasi sistem mengubah pola kerja, efisiensi waktu, serta kepuasan kerja di lingkungan pemerintahan.

Untuk menggali lebih dalam, penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003) yang mencakup enam dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Model ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengembalian belanja daerah berdasarkan pengalaman langsung dari para pengguna seperti Bendahara Pengeluaran SKPD dan petugas SBPK. Integrasi kedua sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat validasi, dan mengurangi kesalahan administratif, yang sejalan dengan temuan (Ladesye Napitupulu et al., 2024) bahwa sistem informasi keuangan terintegrasi terbukti meningkatkan ketepatan data dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap implemenyasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD dalam pengembalian belanja daerah, mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta kepuasan pengguna yang dirasakan dalam penerapan sistem ini, dan memberikan rekomendasi pengembangan sistem untuk kedepannya. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Model DeLone & McLean dalam konteks sistem informasi publik di Indonesia serta memberikan bukti baru mengenai keberhasilan integrasi sistem keuangan daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi BPKD Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan sistem keuangan digital guna meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan akutabilitas publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Integrasi SIPD-SIMPAD tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga langkah nyata dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Melalui integrasi ini, proses kerja menjadi lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel sejalan dengan arah transformasi digital pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Keuangan Publik

Digitalisasi merupakan proses mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat elektronik. Lebih dari sekedar perubahan bentuk data, digitalisasi juga mencakup transformasi cara kerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan (Ramadhani et al., 2024). Dalam konteks keuangan publik, digitalisasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data (Syuhada et al., 2024). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan penerapan sistem elektronik terintegrasi guna memperkuat prinsip *good governance*.

Penelitian (Syuhada et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempercepat perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas publik. Hasil ini diperkuat oleh (Rahmatullah et al., 2025) yang menemukan bahwa kualitas sistem, informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih sistem *e – Government*. Sebagai bentuk implementasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan SIPD yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan SIMPAD yang diatur dalam Pergub No. 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Integrasi kedua sistem ini menghapus penginpiutan ganda, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi secara *real time* (Asih, 2024).

Secara keseluruhan, digitalisasi keuangan publik telah mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, akurat, dan transparan. Selain memudahkan pengawasan penggunaan anggaran, digitalisasi juga mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD dan SIMPAD)

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan organisasi yang melibatkan perangkat keras dan lunak (Latifah, 2024). Dalam konteks keuangan, sistem informasi keuangan berfungsi mengelola dan menyajikan data arus kas, pembayaran, dan anggaran agar dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam proses pengambilan keputusan (Effendi et al., 2023).

Menurut Permendagri No. 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 12, SIPD mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah yang saling terhubung sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan. SIPD dibangun untuk mewujudkan keterpaduan dan integrasi data pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana pada Pasal 6 ayat 1, yang menjadi dasar transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun dikembangkan oleh Kemendagri, pemerintah daerah tetap berwenang mengembangkan sistem keuangan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada PP No. 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebelum SIPD nasional diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dulu menggunakan SIPKD sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan berbagai regulasi, seperti Pergub No. 24 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik yang menyebutkan penggunaan SIPKD dalam pencatatan dan pengelolaan pajak daerah, Pergub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik yang menegaskan integrasi sistem penerimaan daerah dengan sistem keuangan daerah, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 72/SE/2017 tentang Pedoman Penyetoran dan Pengembalian Sisa Belanja ke Kas Daerah juga secara eksplisit menyebutkan penggunaan SIPKD sebagai sistem pencatatan berbagai transaksi, seperti jasa giro, potongan pengadaan barang dan jasa, hingga pengembalian uang muka kerja.

SIPKD menjadi dasar evolusi SIPD DKI yang memiliki fitur lebih unggul daripada SIPD nasional seperti fitur pembayaran daring dan pemotongan pajak otomatis melalui integrasi dengan Bank DKI dan DJP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta tetap menggunakan SIPD karena sistem tersebut lebih efisien dan sesuai dengan proses bisnis keuangan daerah yang sudah berjalan.

Adapun SIMPAD, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2017 SIMPAD adalah Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang

terdapat modul sistem elektronik retribusi dan modul sistem pendapatan asli daerah lainnya serta modul monitoring dan pelaporan penerimaan, dikelola oleh SKPD untuk menerbitkan kode bayar dan kode pelanggan. Surat Edaran Nomor 68/SE/2017 mempertegas kewajiban seluruh SKPD di DKI Jakarta untuk menggunakan SIMPAD secara bertahap sejak Oktober 2017. Menurut (Asih, 2024) SIMPAD digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola dan memantau pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi dan sumber lain yang membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel sehingga membantu pemerintah mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD) pada akhir tahun 2024, dalam konteks pengembalian belanja daerah integrasi ini membuat alur kerja jadi lebih ringkas, lebih cepat, dan pengecekan pengembalian belanja bisa langsung dilakukan serta kesalahan yang muncul saat memakai sistem manual juga bisa berkurang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya integrasi sistem ini diharapkan proses pengembalian belanja daerah menjadi lebih sederhana, lebih efisien, validasi pengembalian belanja bisa dilakukan tanpa menunggu lama, dan potensi kesalahan akibat sistem manual dapat diminimalisir, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Pengembalian Belanja Daerah dalam Konteks Sistem Informasi

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali dan diakui sebagai pengurang ekuitas dalam satu tahun anggaran. Pengembalian belanja adalah proses mengembalikan dana belanja negara ke kas negara. Berdasarkan waktunya, pengembalian belanja dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu Pengembalian Belanja Tahun Lalu yang berarti pengembalian dana atas belanja dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya dan tidak terbatas hanya satu tahun sebelumnya dan yang kedua yaitu Pengembalian Belanja Tahun Berjalan, berarti pengembalian dana atas belanja yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama, sehingga waktu belanja dan pengembaliannya berada dalam periode tahun anggaran yang sama (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Dalam konteks sistem informasi, pengembalian belanja daerah memerlukan sistem yang mampu mencatat, mengelola, dan memeriksa data secara akurat serta terintegrasi agar administrasi lebih tertata dan pengelolaan keuangan lebih efisien. Penelitian (Syuhada et al., 2024) menunjukkan bahwa SIPD mempercepat pekerjaan, mengintegrasikan antar bidang, dan meminimalkan kesalahan laporan anggaran, sedangkan (Asih, 2024) menyebutkan SIMPAD mendukung pengelolaan pendapatan secara transparan dan terintegrasi.

Berdasarkan observasi awal, proses pengembalian belanja daerah di BPKD Provinsi DKI Jakarta sebelumnya melalui dua aplikasi terpisah yaitu SIPD dan SIMPAD, sehingga data harus diinput dua kali dan validasi membutuhkan waktu lama serta dapat terjadi risiko kesalahan pencatatan. SIPD digunakan untuk menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan SIMPAD digunakan untuk mencatat serta memvalidasi pengembalian belanja serta menghasilkan Nota Penerimaan Daerah.

Integrasi kedua sistem tersebut dirancang untuk menghilangkan permasalahan yang telah disebutkan agar tercipta alur yang lebih efisien sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, integrasi SIPD dan SIMPAD dalam pengembalian belanja menjadi konteks penting untuk menggali bagaimana pengguna merasakan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas, serta melihat

kualitas sistem, informasi dan layanan yang dihasilkan melalui penggunaan sistem terintegrasi ini.

Evaluasi Sistem Informasi : Model DeLone & McLean

Evaluasi merupakan proses menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan serta mengidentifikasi kesenjangan antara hasil dan standar untuk mengetahui manfaatnya (Alivia et al., 2025). Evaluasi sistem informasi digunakan untuk menilai kondisi sistem, capaian kinerjanya, serta menjadi dasar perbaikan agar sistem lebih optimal dan bermanfaat. (Satria Dewi et al., 2021). Untuk melihat hal tersebut secara menyeluruh, diperlukan kerangka evaluasi yang tidak hanya melihat kualitas sistem, tetapi juga bagaimana sistem itu digunakan dan dirasakan manfaatnya (Salsabilla & Very, 2025)

Model Kesuksesan Sistem Informasi (DeLone & McLean, 2003) dipahami sebagai kerangka yang membantu melihat bagaimana sebuah sistem informasi dapat benar – benar memberi manfaat bagi organisasi. Di dalamnya ada enam dimensi yang saling terhubung dan menjelaskan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga bagaimana sistem digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna.

Tabel 1 Dimensi Model kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean

No	Dimensi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & Mclean
1.	Kualitas Sistem (<i>System Quality</i>): kemudahan untuk digunakan (<i>ease of use</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), keandalan sistem (<i>reliability</i>), kecepatan akses (<i>response time</i>), dan keamanan sistem (<i>security</i>).
2.	Kualitas Informasi (<i>Information Quality</i>): ketersediaan/kelengkapan informasi (<i>completeness</i>), kemudahan pemahaman (<i>ease of understanding</i>), penyajian informasi (<i>format</i>), relevansi kebutuhan (<i>relevance</i>), dan keakurasian informasi (<i>accurate</i>).
3.	Kualitas Layanan (<i>Service Quality</i>): jaminan sistem (<i>assurance</i>), empati (<i>empathy</i>), dan waktu respon layanan (<i>responsiveness</i>).
4.	Penggunaan (<i>Use</i>): frekuensi penggunaan (<i>frequency of use</i>) dan sifat penggunaan (<i>nature of use</i>).
5.	Kepuasan Pengguna (<i>User Satisfaction</i>): kepuasan informasi (<i>repeat visits</i>) dan kepuasan menyeluruh (<i>overall satisfaction</i>).
6.	Manfaat Bersih (<i>Net Benefits</i>): memudahkan pekerjaan (<i>ease of job</i>), kecepatan menyelesaikan pekerjaan (<i>speed of accomplishing task job performance</i>), dan kegunaan dalam pekerjaan (<i>usefulness in work</i>).

Penelitian ini menggunakan teori **DeLone & McLean (2003)** untuk mengukur keberhasilan sistem informasi melalui enam dimensi utama:

- 1) Kualitas Sistem, menggambarkan sejauh mana sistem dianggap mudah digunakan, andal, cepat, fleksibel, dan aman dalam mendukung pekerjaan pengguna. Dimensi ini penting karena integrasi SIPD-SIMPAD diharapkan mempermudah proses yang sebelumnya dilakukan di dua sistem terpisah.
- 2) Kualitas Informasi, menekankan persepsi terhadap kelengkapan, kejelasan, relevansi, format, dan akurasi data yang dihasilkan sistem dalam mendukung transparansi serta validasi data pengembalian belanja daerah secara *real time*.
- 3) Kualitas Layanan, mencerminkan bagaimana pengguna merasakan dukungan dari pihak teknis dan pengelola sistem, termasuk jaminan keberlanjutan, empati, serta kecepatan

respons terhadap kendala yang dihadapi pengguna selama implementasi sistem terintegrasi.

- 4) Penggunaan, menunjukkan intensitas dan konsistensi pemanfaatan sistem sebagai bagian dari rutinitas kerja.
- 5) Kepuasan pengguna, mencerminkan kenyamanan, kemudahan, dan efektivitas yang dirasakan dalam penggunaan sistem yang terintegrasi ini.
- 6) Manfaat bersih, menggambarkan pandangan pengguna pada dampak nyata sistem dalam efisiensi kerja, pengurangan beban manual, serta peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali secara mendalam bagaimana pengguna memaknai integrasi SIPD-SIMPAD dalam konteks peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi pengguna terhadap implementasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD dalam proses pengembalian belanja daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual berdasarkan pengalaman langsung pengguna. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada implementasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD yang dikelola oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator dan pelaksana utama integrasi sistem yang digunakan oleh SKPD serta SBPK di wilayah DKI Jakarta.

BPKD dan SBPK di tiga wilayah yaitu Jakarta Selatan, Utara dan Pusat, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, dipilih sebagai perwakilan SKPD dan SBPK karena cukup rutin melakukan proses pengembalian belanja daerah. Penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Desember 2025, mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta verifikasi data, hingga analisis temuan. Rentang waktu ini dipilih untuk memastikan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengalaman pengguna setelah sistem terintegrasi.

Informan mencakup pegawai pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam proses pengembalian belanja daerah, meliputi Bendahara Pengeluaran SKPD, petugas SBPK, dan tim efektif integrasi sistem. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, SOP, dokumen pengembalian belanja daerah, serta literatur akademik sebagai referensi untuk memberikan landasan teori dan membandingkan dengan pengalaman lain. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi.

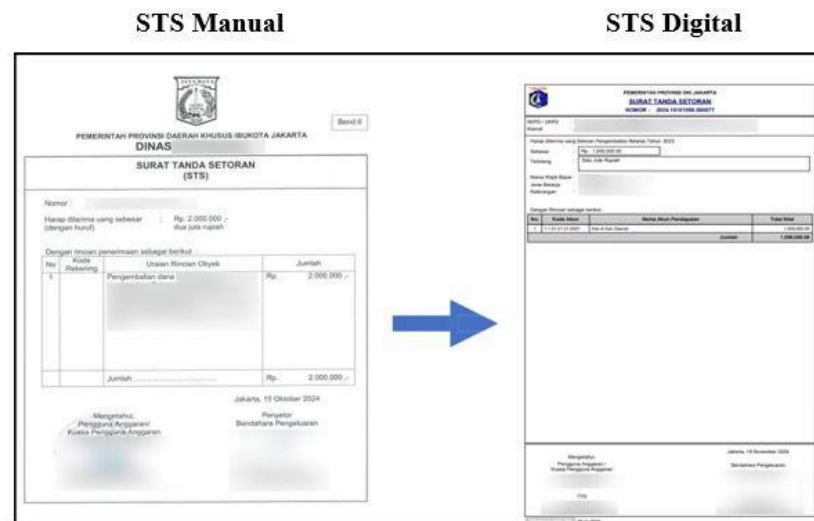
Teknik analisis data mengikuti (Miles & Huberman, 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dibantu perangkat lunak Nvivo 15 untuk pengelompokan tema sesuai dimensi model DeLone & McLean (2003). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil. Pendekatan ini membantu peneliti memahami secara mendalam bagaimana pengguna merasakan integrasi SIPD-SIMPAD dalam hal kemudahan kerja, ketepatan dan kecepatan proses, serta kejelasan dan keandalan layanan dalam pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD dalam proses pengembalian belanja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Model DeLone & McLean (2003) yang mencakup enam dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

a) Kualitas Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum integrasi. Sebelumnya, pengguna harus mengoperasikan dua sistem terpisah yang menyebabkan duplikasi input, keterlambatan validasi, dan potensi kesalahan data. Sejak integrasi diterapkan pada akhir 2024, proses pengembalian belanja dapat dilakukan langsung melalui SIPD dan otomatis tersinkronisasi dengan SIMPAD.



Gambar 3 Perubahan STS Manual ke Digital

Sistem kini dirasa lebih mudah digunakan (*ease of use*) karena alur kerja terstruktur dari Input setoran hingga valisasi tanpa perlu menggunakan dua aplikasi, bendahara pengeluaran input data pengembalian di SIPD maka akan langsung tersinkronisasi pada SIMPAD, sehingga petugas SBPK bisa langsung memverifikasi dan memvalidasi serta menerbitkan Nota penerimaan daerah. Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa fitur tanda tangan digital atau elektronik (TTE) pada dokumen seperti STS belum diimplementasikan, sehingga dokumen masih perlu dicetak dan ditandatangani secara manual untuk kebutuhan arsip dan legalitas.

Beberapa SKPD tetap menyerahkan dokumen Surat tanda Setoran (STS) yang telah ditandatangani secara basah oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran, beserta bukti transfer dana kepada SBPK sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Sebaliknya, SBPK juga masih menyerahkan atau mengirimkan NPD yang telah distempel baik secara fisik maupun melalui *Whatsapp* kepada Bendahara SKPD. Alasan utama dari praktik ini, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber adalah karena dokumen fisik masih dibutuhkan untuk keperluan arsip dan audit serta sebagai bentuk validasi administratif tambahan, sehingga walaupun sistem sudah sepenuhnya digital, unsur dokumentasi fisik tetap dipertahankan sebagai pelengkap dan jaminan akuntabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara sistemik seluruh proses pengembalian belanja telah digital dan terintegrasi antara SIPD-SIMPAD, namun pada tingkat implementasi masih terdapat adaptasi bertahap menuju sistem tanpa dokumen fisik sepenuhnya.

Gambar 4 Kecepatan Proses Validasi yang Terlihat Pada Tanggal di Nota Penerimaan Daerah

Kecepatan proses (*response time*) juga meningkat, validasi yang sebelumnya memakan waktu dua hingga tiga hari kini dapat diselesaikan dalam satu hari berkat konektivitas *real time*. Dari sisi keandalan (*reliability*), sistem dirasakan stabil meski sesekali melambat pada jam sibuk, namun jika ada gangguan segera ditangani oleh tim teknis. Dari aspek keamanan (*security*), sistem dianggap telah memberikan data yang baik. Setiap pengguna hanya dapat mengakses menu tertentu sesuai dengan peran dan otoritasnya, misalnya Bendahara Pengeluaran SKPD hanya dapat *login* melalui akun SIPD untuk melakukan input pengembalian belanja, sedangkan Pelaksana Pengolah Data SBPK memiliki otoritas penuh di SIMPAD untuk proses validasi dan penerbitan Nota Penerimaan Daerah (NPD).

Selanjutnya, dari sisi fleksibilitas (*flexibility*) sistem memungkinkan berbagai jenis transaksi pengembalian belanja baik pengembalian tahun berjalan maupun tahun lalu yang dilakukan dalam satu *platform* dengan pemantauan status validasi secara langsung pada sistem. Secara keseluruhan, Kualitas Sistem (*System Quality*) menunjukkan bahwa integrasi SIPD-SIMPAD mampu meningkatkan kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan data, keandalan, keamanan dan fleksibilitas sistem dibandingkan sebelumnya. Sistem ini diakui lebih efisien, stabil, serta adaptif terhadap kebutuhan kerja pengguna, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam penerapan tanda tangan digital/elektronik dan penyederhanaan prosedur fisik antarunit kerja.

b) Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Dari hasil wawancara, informan menilai bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem terintegrasi sudah sangat baik, karena proses pengembalian belanja mengalami perubahan signifikan. Setiap data yang diinput oleh Bendahara Pengeluaran di SIPD kini otomatis tersinkronisasi, tercatat dan ditampilkan secara *real time* ke SIMPAD tanpa perlu unggah manual dan juga informasi yang ditampilkan seperti identitas SKPD, kode akun, uraian transaksi dan nominal tersedia lengkap (*completeness*) dalam sistem.

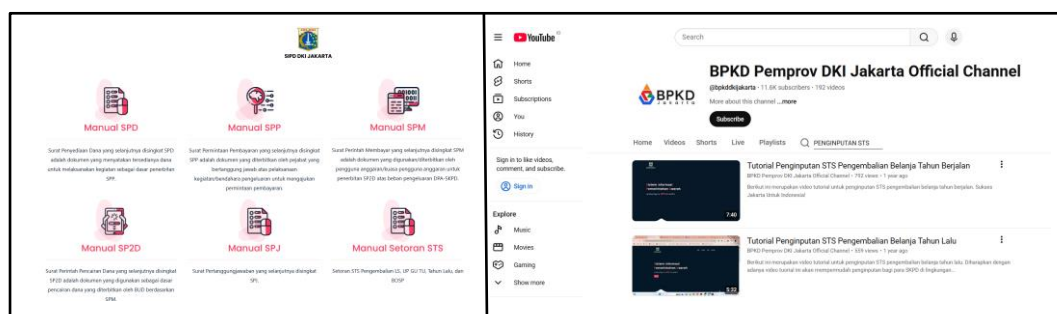
Para pengguna menyampaikan bahwa informasi yang dihasilkan sistem mudah dipahami (*ease of understanding*) karena tampilan menu dan format laporannya tertata rapi mengikuti alur kerja sehari-hari. Misalnya, menu “Daftar Transaksi” di SIMPAD menampilkan seluruh data pengembalian belanja secara jelas, seperti nama SKPD, nominal, status validasi, dll. Sementara itu, di SIPD juga terdapat kolom “Nomor Validasi” dan “Tanggal Validasi” yang membantu bendahara mengetahui apakah transaksi sudah divalidasi atau belum oleh SBPK. Selain itu, format informasi (*format*) dokumen STS dan NPD yang dihasilkan sistem juga mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga mempermudah proses pemeriksaan dan pencocokan data.

Dari sisi akurasi (*accuracy*), informan menyampaikan bahwa potensi kesalahan data berkurang karena sistem terhubung otomatis. Sebelumnya, ketika STS harus dibuat manual dan diantar ke SBPK, sering terjadi kesalahan pencatatan data STS, misalnya seperti kesalahan penggunaan kode akun. Setelah sistem terintegrasi, kode akun, nominal, dan uraian transaksi otomatis tersinkronisasi antara SIPD dan SIMPAD sehingga risiko kesalahan berkurang. Selain itu, relevansi informasi (*relevance*) juga meningkat karena laporan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan baik di tingkat SKPD maupun SBPK. Informasi transaksi juga dapat ditelusuri kembali dengan mudah karena setiap data memiliki nomor validasi dan tanggal verifikasi yang otomatis tercatat di sistem.

Dengan demikian, dari perspektif Kualitas Informasi (*Information Quality*) integrasi SIPD-SIMPAD terbukti berhasil mewujudkan penyajian data yang lebih lengkap, akurat, relevan, dan mudah dipahami yang pada akhirnya mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan.

c) Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Dimensi kualitas layanan menggambarkan dukungan teknis, koordinasi dan pendampingan yang diberikan kepada pengguna selama implementasi maupun operasional sistem. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa dukungan dari tim teknis dan tim efektif integrasi sangat membantu, baik pada tahap transisi awal maupun dalam penggunaan sistem sehari-hari. Para Informan menyatakan bahwa respons (*responsiveness*) tim efektif integrasi dan tim teknis sangat cepat, baik pada masa awal penerapan maupun saat terjadi kendala dalam penggunaan sehari-hari. Kendala biasanya hanya terjadi beberapa jam saja dan maksimal satu hari karena, setiap laporan kendala segera ditindaklanjuti, sehingga proses pekerjaan dapat kembali berjalan normal dalam waktu singkat.



Gambar 5 Modul dan Tutorial pada Youtube BPKD

Selain itu, pengguna juga merasakan empati (*empathy*) dari tim efektif integrasi yang memahami kebutuhan pengguna di lapangan. Bentuk dukungan diberikan melalui sosialisasi, pembuatan modul panduan yang filenya dapat diakses melalui portal SIPD DKI Jakarta, serta tutorial penginputan STS yang diunggah di kanal Youtube resmi

BPKD Provinsi DKI Jakarta. Melalui dukungan ini, bendahara SKPD maupun petugas SBPK juga dapat mempelajari alur kerja sistem secara mandiri.

Dari sisi tim teknis, Pusdatin juga menunjuk *Person in Charge* (PIC) khusus untuk masing – masing sistem, yakni SIPD dan SIMPAD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kendala dapat segera ditangani oleh pihak berwenang sesuai sistem yang bermasalah. Berdasarkan keterangan informan, hambatan lebih sering terjadi pada SIPD, karena sistem ini memiliki beban kerja dan menu yang jauh lebih kompleks dibandingkan SIMPAD, serta terhubung langsung dengan sistem Pajak dan Bank DKI. Meskipun demikian, tim teknis bergerak cepat dalam menangani setiap gangguan, baik pada SIPD maupun SIMPAD, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tertunda terlalu lama.

Koordinasi antarunit juga diperkuat melalui pembentukan grup komunikasi khusus pada *Whatsapp*/Telegram yang beranggotakan perwakilan dari seluruh SKPD dan SBPK di lima wilayah DKI Jakarta. Melalui grup ini, setiap kendala atau laporan error dapat disampaikan secara langsung dan direspons dengan cepat oleh PIC atau tim teknis yang bertanggung jawab.

Namun, meskipun media pembelajaran telah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan masih ada beberapa bendahara SKPD yang kerap bertanya langsung kepada SBPK mengenai alur penginputan STS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya literasi digital sebagian bendahara dalam memahami perubahan sistem, kekhawatiran melakukan kesalahan input terutama bagi pengguna baru yang biasanya disebabkan karena adanya mutasi pegawai, di mana bendahara belum terbiasa dengan mekanisme pengembalian belanja di SKPD tempatnya bertugas saat ini, karena di SKPD sebelumnya proses tersebut jarang dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai sarana pembelajaran telah disediakan, pendampingan khusus bagi beberapa SKPD dan sosialisasi berkala masih diperlukan, setidaknya satu kali dalam setahun, agar seluruh SKPD dapat menyesuaikan diri secara optimal terhadap perkembangan sistem. Selain itu, pengguna juga menyampaikan harapan agar jaminan keberlanjutan layanan (*assurance*) terus diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem pada waktu sibuk, mengingat volumen transaksi pengembalian belanja meningkat pada periode tertentu seperti menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, kualitas layanan (*service quality*) sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD dirasakan baik dan responsif oleh informan. Dukungan teknis yang cepat, adanya pendampingan serta tersedianya media pembelajaran dan jalur komunikasi langsung menjadikan pengguna merasa lebih terbantu dalam menjalankan proses pengembalian belanja daerah secara digital. Meski masih terdapat perbedaan tingkat literasi dan kemampuan adaptasi antar-SKPD, tetapi pendekatan kolaboratif antara BPKD, Pusdatin, dan SBPK telah memberikan fondasi layanan yang kuat bagi keberhasilan implementasi sistem integrasi keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

d) Penggunaan (*Use*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD digunakan secara rutin dan menyeluruh oleh seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pelaksana Pengolah Data SBPK dalam setiap proses pengembalian belanja daerah. Sebelum integrasi, SIPD hanya digunakan untuk transaksi pengeluaran dan sebagian pengembalian tahun berjalan, sementara SIMPAD digunakan untuk menginput ulang dan upload dokumen manual. Setelah integrasi, Bendahara Pengeluaran SKPD hanya perlu

mengakses satu sistem yaitu SIPD untuk menginput transaksi pengembalian belanja yang otomatis tersinkronisasi ke SIMPAD untuk divalidasi oleh SBPK.

Para informan menyampaikan bahwa sistem SIPD-SIMPAD telah menjadi bagian dari alur kerja rutin (*nature of use*). Sebelumnya, pengguna harus melakukan langkah tambahan seperti menginput ulang data ke dua sistem, menyerahkan dokumen fisik, tetapi kini seluruh proses sudah terintegrasi dalam satu alur kerja digital. Frekuensi (*frequency*) penggunaan sistem tidak sama atau bervariasi dan bergantung pada jumlah SKPD yang dikoordinasikan oleh masing – masing SBPK serta banyaknya pengembalian belanja di SKPD tersebut. Misalnya, informan dari SBPK Jakarta Selatan menyampaikan bahwa transaksi pengembalian belanja hampir terjadi setiap hari, terutama berasal dari Dinas Pendidikan yang sering melakukan pengembalian atas belanja pegawai dan honor guru. Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa SBPK wilayah lain dengan jumlah SKPD yang relatif banyak, di mana aktivitas pengembalian belanja berlangsung lebih rutin. Sebaliknya, pada SKPD yang memiliki aktivitas pengembalian lebih sedikit, maka penggunaan sistem bersifat situasional yang dilakukan hanya ketika terdapat transaksi pengembalian belanja. Namun demikian, seluruh informan sepakat menyampaikan bahwa penggunaan sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD ini bersifat wajib dan telah menjadi satu – satunya jalur resmi yang digunakan dalam proses pengembalian belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD telah sepenuhnya mengubah pola kerja manual menjadi digital, menjadikannya bagian utama dari mekanisme pengelolaan pengembalian belanja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e) Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap implementasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD. Seluruh informan menyatakan bahwa pekerjaan mereka kini terasa jauh lebih mudah, cepat, dan tertata dibandingkan sebelum integrasi diberlakukan. Sistem ini dianggap memberikan perubahan nyata, terutama karena pengguna tidak lagi harus melakukan penginputan ganda atau membawa dokumen fisik untuk proses validasi di SBPK seperti sebelumnya.

Dari aspek kepuasan informasi (*repeat visits*), para pengguna mengungkapkan bahwa sistem ini menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses sesuai kebutuhan kerja. Sistem ini lebih praktis dan efisien, karena seluruh proses pengembalian belanja dapat dilakukan secara digital melalui sistem yang terintegrasi. Bagi bendahara, fitur seperti adanya kolom “Nomor Validasi” dan “Tanggal Divalidasi” pada SIPD memberikan rasa nyaman karena memudahkan untuk memonitoring status pengembalian secara *real time*, tanpa harus menunggu konfirmasi manual dari SBPK.

Demikian pula bagi Pelaksana Pengolah Data SBPK, transaksi pengembalian belanja yang telah diinput di SIPD seluruhnya akan otomatis tersinkronisasi ke SIMPAD pada menu “Daftar Transaksi” sehingga SBPK tidak perlu menginput ulang pengembalian belanja tahun lalu yang seluruh prosesnya masih manual seperti saat sebelum sistem terintegrasi dan keberadaan menu “Rekon Data dan Dana” di SIMPAD sangat membantu untuk melihat secara langsung dana yang masuk dan mencocokkannya dengan data transaksi, sehingga proses validasi menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudahan ini menumbuhkan kepercayaan terhadap keandalan data yang dihasilkan sistem, sehingga pengguna merasa nyaman untuk terus menggunakan sistem tersebut setiap kali melakukan transaksi pengembalian.

Sementara dari sisi kepuasan menyeluruh (*overall satisfaction*), seluruh informan menyatakan bahwa sistem terintegrasi ini memberikan pengalaman kerja yang lebih efisien dan tertata dibandingkan sebelum integrasi diberlakukan. Perubahan ini tidak

hanya mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas, karena seluruh proses terekam dalam sistem dan dapat ditelusuri kapan pun dibutuhkan.

Namun demikian, walaupun sistem sudah sepenuhnya digital, tetapi informan masih merasakan adanya ketidakpuasan terutama karena belum adanya tanda tangan digital/elektronik pada STS Digital dan belum seragamnya mekanisme penyampaian STS dan Nota Penerimaan Daerah (NPD) antarwilayah. Tetapi, perbedaan tersebut dianggap wajar karena sistem yang baru terintegrasi ini masih membutuhkan penyempurnaan agar seluruh proses benar – benar dapat berjalan tanpa dokumen fisik. Selain itu, informan juga menekankan bahwa dokumen fisik masih dibutuhkan sebagai arsip administratif dan untuk memenuhi kebutuhan audit serta pelaporan yang masih mensyaratkan bukti fisik dengan tanda tangan basah dan stempel resmi. Dengan demikian, dokumen fisik berfungsi sebagai pelengkap arsip, sementara seluruh proses utama sudah berjalan sepenuhnya melalui sistem digital.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction*) dapat dikatakan tinggi, hal dapat disimpulkan berdasarkan persepsi dan pengalaman seluruh informan yang sepakat menyatakan dan merasakan bahwa sistem ini memberikan pengalaman kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kepuasan pengguna ini lah yang menjadi indikator penting keberhasilan implementasi sistem terintegrasi ini, sekaligus membuktikan penerimaan dan kepercayaan pengguna terhadap transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

f) Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Dimensi ini mencerminkan sejauh mana sistem informasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, para informan sepakat bahwa penerapan sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD membawa manfaat yang signifikan dalam aspek kemudahan pekerjaan (*ease of job*), kecepatan penyelesaian tugas (*speed of accomplishing task job performance*), dan kegunaan dalam pekerjaan (*usefulness in work*).

Dari sisi kemudahan pekerjaan (*ease of job*), sistem terintegrasi membuat alur kerja bendahara dan SBPK menjadi lebih sederhana. Bendahara tidak perlu menginput dan mengupload ulang data pengembalian belanja serta mengantarkan STS ke SBPK. Begitu juga dengan SBPK yang tidak perlu melakukan penginputan manual pada SIMPAD untuk pengembalian belanja tahun lalu. Kini seluruh proses penginputan pengembalian belanja dilakukan melalui SIPD dan data otomatis tersinkronisasi ke SIMPAD untuk divalidasi, sehingga mengurangi beban administratif dan potensi kesalahan.

Kecepatan penyelesaian pekerjaan (*speed of accomplishing task*) juga dirasakan oleh para pengguna. Jika sebelumnya validasi dan penerbitan Nota Penerimaan Daerah (NPD) membutuhkan waktu dua hingga tiga hari, kini seluruh proses dapat selesai dalam satu hari berkat konektivitas *real-time* antar sistem, fitur transfer otomatis di SIPD yang terhubung dengan Bank DKI, dan menu “Rekon Data dan Dana” di SIMPAD sangat membantu untuk melihat secara langsung dana yang masuk dan mencocokkannya dengan data transaksi, sehingga proses validasi menjadi lebih cepat dan transparan serta meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan.

Selain efisiensi, sistem juga meningkatkan kegunaan dalam pekerjaan (*usefulness in work*). Setiap transaksi kini mudah ditelusuri melalui nomor validasi dan tanggal verifikasi. Fitur seperti “Daftar Transaksi” dan “Rekon Data dan Dana” di SIMPAD membantu memastikan kesesuaian antara data dan dana yang masuk ke rekening kas daerah. Hal ini menumbuhkan rasa aman karena seluruh transaksi tercatat resmi dalam sistem. Integrasi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,

karena SKPD dan SBPK mengakses data yang sama secara daring dan *real-time*. Walaupun sebagian kecil prosedur fisik seperti pencetakan STS dan NPD bertanda tangan basah masih dipertahankan untuk keperluan arsip, tetapi sistem digital tetap menjadi instrumen utama dalam pencatatan dan validasi.

Secara keseluruhan, sistem SIPD–SIMPAD memberikan manfaat nyata dalam tiga aspek utama yaitu efisiensi dan penyederhanaan alur kerja, percepatan proses dan peningkatan ketepatan pelaporan serta penguatan transparansi serta akuntabilitas publik. Dengan demikian, penerapan sistem terintegrasi SIPD–SIMPAD tidak hanya mempermudah pekerjaan teknis pengguna, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, data keuangan lebih akurat, dan koordinasi antarinstansi berjalan lebih efisien. Integrasi ini juga membantu membangun kepercayaan publik karena seluruh proses pengembalian belanja kini tercatat secara transparan dan dapat dipantau secara digital.

g) Analisis Data Menggunakan Nvivo 15

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Nvivo 15 sebagai alat bantu analisis untuk memperkuat hasil wawancara kualitatif. Aplikasi ini membantu peneliti mengelola, mengode, dan memvisualisasikan data secara sistematis sehingga pola, tema utama, dan hubungan antar kategori lebih mudah dipahami. Visualisasi dalam Nvivo digunakan sebagai pendukung temuan penelitian dalam menunjukkan konsistensi persepsi pengguna terhadap implementasi sistem terintegrasi SIPD-SIMPAD.

Dalam penelitian, peneliti memanfaatkan penggunaan visualisasi *word cloud* dan *hierarchy chart*. *Word cloud* digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kata atau istilah yang paling sering muncul dalam pernyataan informan, sehingga membantu mengidentifikasi fokus umum pembahasan. Sementara itu, *hierarchy chart* digunakan untuk menunjukkan tema dan subtema yang muncul dari hasil pengodean, serta memperlihatkan tema mana yang paling banyak dibahas oleh informan.

1) *Word Cloud*



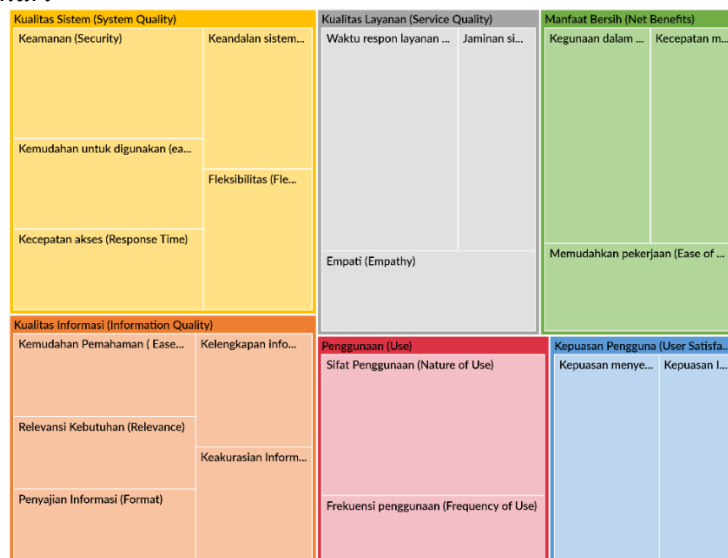
Gambar 6 Word Cloud

Word Cloud digunakan untuk menampilkan kata atau istilah yang paling sering muncul dalam pernyataan informan, di mana ukuran kata menunjukkan tingkat frekuensinya. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi fokus pembahasan informan yang banyak berkaitan dengan pengembalian belanja, transaksi, validasi, dan otomatisasi sistem.

Kata – kata dominan seperti “pengembalian”, “transaksi”, dan “validasi langsung” menunjukkan bahwa informan menyoroti perubahan proses kerja yang kini lebih cepat dan digital setelah integrasi SIPD-SIMPAD. Munculnya istilah “efisien”,

“transparan”, dan “tercatat” menggambarkan persepsi positif terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan pelacakan transaksi. Secara keseluruhan, hasil *word cloud* memperlihatkan bahwa persepsi pengguna didominasi oleh tema otomatisasi, efisiensi, integrasi, transparansi, dan kemudahan kerja, yang memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi pada dimensi kepuasan pengguna dan manfaat bersih dalam Model DeLone & McLean.

2) Hierarchy Chart



Gambar 7 Hierarchy Chart

Hierarchy chart digunakan untuk menampilkan hubungan hierarkis tema dan subtema berdasarkan frekuensi pengodean yang menunjukkan aspek yang paling dominan dalam persepsi informan. Pada dimensi kualitas sistem, aspek keamanan (*security*), kemudahan penggunaan (*ease of use*), dan kecepatan akses (*response time*) paling menonjol, menggambarkan pengalaman pengguna yang merasakan sistem lebih aman, mudah dan cepat setelah integrasi. Aspek keandalan (*reliability*) dan fleksibilitas (*flexibility*) juga muncul, meski masi memerlukan penyempurnaan, terutama terkait tanda tangan digital dan kestabilan saat jam sibuk.

Pada kualitas informasi, aspek kelengkapan, akurasi, relevansi, dan kemudahan pemahaman muncul merata. Hal ini menegaskan bahwa sistem SIPD-SIMPAD telah menyediakan informasi yang jelas, *real time*, dan mendukung transparansi. Kualitas layanan didominasi oleh waktu respon layanan (*responsiveness*) dan jaminan layanan (*assurace*) yang menunjukkan apresiasi terhadap kecepatan dan ketepatan dukungan teknis, meskipun aspek empati (*empathy*) masih perlu diperkuat melalui sosialisasi tambahan dan pendampingan lanjutan bagi beberapa SKPD.

Pada dimensi penggunaan (*use*) aspek sifat penggunaan (*nature of use*) mendominasi, menandakan bahwa sistem telah menjadi bagian dari alur kerja atau wajib digunakan dalam proses pengembalian belanja. Perbedaan ukuran pada aspek frekuensi pengguna (*frequency of us*) mencerminkan variasi tingkat penggunaan antar SKPD dan SBPK, yang bergantung pada volume transaksi pengembalian belanja dan banyaknya SKPD yang dibawah koordinasi SBPK. Pada dimensi kepuasan pengguna, menunjukkan bahwa kepuasan menyeluruh (*overall satisfaction*) dan kepuasan informasi (*repeat visits*) merupakan aspek yang cukup dominan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh informan merasakan manfaat langsung dari implementasi sistem terintegrasi dalam hal efisiensi kerja, keteraturan proses, dan kemudahan monitoring transaksi. Namun

demikian, masih adanya catatan ketidakpuasan terkait belum diterapkannya tanda tangan digital dan masih adanya perbedaan mekanisme penyampaian dokumen fisik antarwilayah.

Dimensi Manfaat Bersih, memperlihatkan dominasi aspek kemudahan pekerjaan (*ease of job*), kecepatan menyelesaikan pekerjaan (*speed of accomplishing task job performance*), dan kegunaan dalam pekerjaan (*usefulness in wok*). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat sistem paling dirasakan pada aspek operasional, seperti pengurangan beban kerja, percepatan proses validasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa integrasi SIPD-SIMPAD memberikan hasil nyata terhadap kinerja individu dan organisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, *hierarchy chart* ini menunjukkan bahwa Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Manfaat Bersih merupakan dimensi yang paling dominan dalam persepsi informan. Visualisasi ini membantu memperjelas struktur tema dan intensitas pembahasan setiap dimensi, sekaligus memperkuat hasil analisis kualitatif yang telah dijabarkan secara naratif.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sistem SIPD-SIMPAD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikelola oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator dan pelaksana utama integrasi sistem yang digunakan oleh SKPD serta SBPK di wilayah DKI Jakarta telah berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses pengembalian belanja daerah, dengan menggunakan pendekatan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003), dapat disimpulkan bahwa implementasi integrasi kedua sistem tersebut telah membawa perubahan positif.

Dari sisi kualitas sistem, integrasi SIPD-SIMPAD menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan, cepat, stabil, mengurangi duplikasi input serta mempercepat validasi transaksi. Kualitas informasi meningkat melalui penyajian data yang akurat, lengkap, dan *real time* yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Kualitas layanan dirasakan responsif dan komunikatif, meski masih dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi beberapa SKPD. Sistem ini telah digunakan secara rutin dan menggambarkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi karena para pengguna merasakan kemudahan serta ketertiba administrasi yang dihasilkan. Pada dimensi manfaat bersih, integrasi terbukti mempercepat proses kerja, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat prinsip *good governance*.

Secara keseluruhan, keberhasilan integrasi SIPD-SIMPAD dalam proses pengembalian belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. Sistem ini menjadi langkah strategis dalam transformasi digital keuangan daerah menuju pemerintahan yang efisien dan transparan.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian evaluasi keberhasilan sistem informasi publik dengan Model DeLone & McLean. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian ke wilayah lain atau menambahkan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat memperkuat bukti hubungan antar dimensi. Secara praktis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPKD perlu memperkuat pelatihan dan pendampingan rutin bagi SKPD, meningkatkan stabilitas sistem, serta mengembangkan fitur seperti tanda tangan elektronik atau digital. Pusdatin dan tim teknis diharapkan tetap responsif, sementara pemerintah daerah lain dapat menjadikan

keberhasilan integrasi SIPD-SIMPAD sebagai praktik baik dalam pengelolaan keuangan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivia, A., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen : Kriteria dan Metode Pengukuran. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1).
- Asih, B. (2024). *Laporan hasil implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik PENINGKATAN EFEKTIVITAS KONSOLIDASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA DAERAH MELALUI INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPAD)*.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://eli.johogo.com/Class/p7.pdf>
- Effendi, E., Sagalai, R. S. A., & Rezeki, S. (2023). Jenis-Jenis Sistem Informasi Dan Model Sistem Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4944–4952.
- Fitri Rahmadany, A. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran Final*, 2018. 148–170. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan_teknis/bendahara/Panduan-Teknis_Bendahara-Pengeluaran_Final.pdf
- Ladesye Napitupulu, D., Roihan Hanif Bancin, M., Aminah Lubis, T., Andiga Juanda, R., & Nurmala Sari, E. (2024). Implementation And Effectiveness Of Local Government Information Systems (SIPD) In Indonesia: A Literature Study. *Medan International Economics and Business*, 2(1), 1901–1919.
- Latifah, S. (2024). Implementasi Sistem Informasi Desa. *Jurnal Teknologi Dan Pemerintahan*, 2(2), 44–52.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Rahmatullah, R., Habibi, A., Khaeruddin, K., Yaqin, L. N., Alharmali, T. M., Fauzee, M. S. O., & Mahat, J. (2025). A study of user satisfaction and net benefits in indonesia through the DeLone and McLean Model for E-Government success. *Discover*

Sustainability, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01645-4>

- Ramadhani, S., Yasifa, A., & Rizky, R. (2024). Proses Digitalisasi Administrasi di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Mappesona*, 7(2), 65–74.
- Salsabilla, N. P., & Very, J. (2025). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi dalam Manajemen Perusahaan Menggunakan Model DeLone dan McLean. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3831–3837. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8146>
- Satria Dewi, W., Ginting, D., & Gultom, R. (2021). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Di Instalasi Rekam Medis RSUP H. Adam Malik Dengan Metode Human Organization Technology Fit (HOT-FIT) Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(1), 73–82. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i1.510>
- Septiani, I., & Isnawaty, N. weti. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Syuhada, F. F., Julian, C., Iriani, A., Chairani, A. L., & Austin, T. (2024). Transformasi E-Government Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 12(2), 7–14.